

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Halaman Judul

LAPORAN KINERJA (LKJ)
TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Kata Pengantar



Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 11 Bantul 2016 tentang Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Bantul, 24 Januari 2020

Kepala

DPUPKR

Bobot Ariffi 'Aidin, ST., MT.

NIP. 19690619 1996 03 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, kinerjanya dalam memberikan pelayanan melaporkan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi dari skema pembelajaran bagi bagian organisasi meningkatkan pemerintah untuk terus kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2019 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

tentang Perubahan Peraturan 19 Tahun 2018 Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Perubahan Rencana Strategis telah menyusun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

a. perumusan kebijakan bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa kontruksi;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa kontruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa kontruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan

bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima IKU, disimpulkan bahwa kelima indikator berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 100,98%. Kelima indikator tersebut adalah:

- 1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
- 2. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik.
- 3. Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani.
- 4. Persentase kecukupan air irigasi.
- 5. Persentase penanganan banjir.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan

untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

| | | | hlmn. |
|---------------------|----------------------|---|------------------|
| Halama | an Ju | ıdul | i |
| Kata Pe | enga | ntar | iii |
| Ikhtisar | Ekse | ekutif | vii |
| Daftar I | lsi | | XV |
| Daftar ⁻ | Tabe | <u> </u> | xvii |
| | A. B. C. D. | dahuluan Latar Belakang Pembentukan OPD Susunan Organisasi Keragaman SDM Isu Strategis | 1 2 4 7 |
| 1. | A. Visi Tuju | ncanaan KinerjaRencana Strategisdan Misian dan Sasaranjakan, Strategi dan Program | . 15 15 19 |
| | В. С. | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Program Untuk Pencapaian Sasaran | |

| Bab III Akuntabilitas Kine | erja35 | |
|----------------------------|--|----|
| A. Capaian Indi | kator Kinerja Utama Tahun | |
| 2019 | 37 | |
| | Analisis Capaian Kinerja 40 ya kualitas sarana dan prasarana publik | 40 |
| 2. Sasaran 2: Meningkatn | ya kecukupan air irigasi | 47 |
| 3. Sasaran 3: Meningkatn | ya penanganan banjir | 56 |
| 4. Sasaran 4 : Meningkatı | nya pelayanan dasar pada masyarakat | 59 |
| C. Akuntabilitas | S Anggaran71 | |
| D. Efisiensi Sum | ber Daya75 | |
| Bab IV Penutup | 78 | |

Daftar Tabel

| | hlmn. | |
|-----------|--|------|
| Tabel 1. | Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dar | 1 |
| | tingkat pendidikan Tahun 2019 | 8 |
| Tabel 2. | Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungar | n |
| | DPUPKP | 9 |
| Tabel 3. | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja | . 20 |
| Tabel 4. | Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dan Akhir Renstra | . 21 |
| Tabel 5. | Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasar | 1 |
| | Permukiman | . 23 |
| Tabel 6. | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama | . 27 |
| Tabel 7. | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 | . 29 |
| Tabel 8. | Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019 | . 34 |
| Tabel 9. | Skala Nilai Peringkat Kinerja | . 37 |
| Tabel 10. | Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | . 39 |
| Tabel 11. | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dar | 1 |
| | Prasarana Publik | . 41 |
| Tabel 12. | Kondisi jalan Kabupaten Bantul per Desember 2019 | . 42 |
| Tabel 13. | Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kecukupan Air Irigasi | . 49 |
| Tabel 14. | Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016-2018 | . 50 |
| Tabel 15. | Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2018 | . 51 |
| Tabel 16. | Capaian Persentase Penanganan Banjir Tahun 2019 | . 57 |
| Tabel 17. | Target, Realisasi, dan Kinerja untuk Indikator Penanganan Banjir (%) Tahur | 1 |
| | 2015-2019 | . 58 |
| | | |

| Tabel 18. | Capaian Persentase Kawasan Kumuh Tertangani Tahun 2019 | 60 |
|-----------|---|----|
| Tabel 19. | Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019 | 72 |
| Tabel 20. | Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 | 75 |
| Tabel 21. | Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | 77 |

Bab I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan

berisi:

- a. Latar Belakang
- b. Pembentukan OPD
- c. Susunan Organisasi
- d. Keragaman SDM
- e. Isu Strategis

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul merupakan perangkat

daerah pelaksana urusan pemerintahan unsur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada melalui Sekretaris Daerah. DPUPKP mempunyai Bupati membantu melaksanakan Bupati tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

2019 LK_J DPUPKP

Daerah Perubahan Kabupaten Bantul, DPUPKP Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

B. Pembentukan OPD

DPUPKP merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tentang Pembentukan dan Susunan Tahun 2016 Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUPKP Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati Kabupaten melaksanakan pemerintahan menjadi yang urusan

kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DPUPKP menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman serta jasa kontruksi;
- pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa kontruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa kontruksi, serta perumahan dan kawasan permukiman;
- 4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

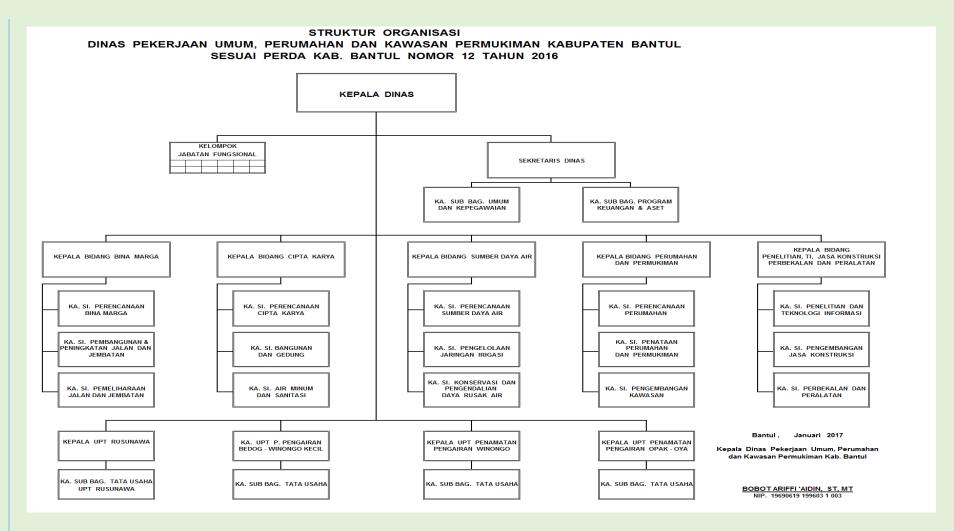
C. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi DPUPKP Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUPKP Kabupaten Bantul terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang Bina Marga;
- 4. Bidang Cipta Karya;
- 5. Bidang Sumber Daya Air;
- 6. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- 7. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan;

- 8. UPT; dan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas PUPKP dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi DPUPKP Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Sumberdaya manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan survai lapangan, perencanaan DED, pengawasan pelaksanaan di lapangan agar sesuai dengan dokumen rencana, evaluasi dan laporan implementasi secara tepat dan cepat sesuai kurun waktunya. Jumlah Pegawai Dinas PUPKP Kabupaten Bantul per 31 Desember 2019 ada 111 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan Tahun 2019

| Jumlah Jenis Kelamin | | | | Pangkat / Golongan | | | | Tingkat Pendidikan | | | | | |
|----------------------|-----|-------|--------|--------------------|----|----|----|--------------------|------|------|------|----|----|
| Pega | wai | Laki2 | Wanita | _ | Ш | Ш | IV | SD | SLTP | SLTA | DIII | S1 | S2 |
| 11 | 11 | 100 | 10 | 6 | 46 | 48 | 11 | 6 | 9 | 60 | 3 | 18 | 15 |

Sumber: DPUPKP, 2019

Selanjutnya data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP sebagaimana tabel 2.

Tabel 2. Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di Lingkungan DPUPKP

| Didana | Jumlah | Golongan | | | | |
|--|--------|----------|----|----|----|--|
| Bidang | Juman | I | П | Ш | IV | |
| Kepala Dinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sekretariat | 32 | 4 | 16 | 11 | 1 | |
| Bidang Bina Marga | 14 | 1 | 4 | 8 | 1 | |
| Bidang Cipta Karya | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Bidang Sumber Daya Air | 13 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| Bidang Lit,TI, Jakon dan Alkal | 13 | 0 | 3 | 9 | 1 | |
| UPT Pengamatan Pengairan BWK | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| UPT Pengamatan Pengairan Winongo | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Arsiparis/JFT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 111 | 6 | 46 | 48 | 11 | |

Sumber: DPUPKP, 2019

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PUPKP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal yang tidak menghilangkan peluang dimanfaatkan, akan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas PUPKP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PUPKP dimasa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

Isu Strategis Bidang Bina Marga

- Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
- Pembebanan berlebih (overloading) masih terjadi terutama pada lintas jalan menuju/dari lokasi pengambilan galian C.
- Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan menuju daerah terisolir, kawasan budaya, wisata serta sentra-sentra industri.

Isu Strategis Bidang Cipta Karya

 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum dan air limbah.

- Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah sebagai bagian dari upaya merealisasikan good gavernance
- 3. Pengelolaan drainase lingkungan dengan memberdayakan masyarakat

Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

- Peningkatan pelayanan kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irgasi dan optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan
- Perlindungan kawasan permukiman, pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sektor strategis lainnya dari ancaman banjir
- 3. Pengelolaan bahan galian golongan C, air baku melalui pengurusan, pembinaan, pengembangan

dan pengawasan penggunaan air baku dan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Isu Strategis Bidang Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman yang baik seharusnya memiliki infrastruktur dasar yang baik agar tercipta lingkungan yang sehat sebagai penunjang dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Beberapa permasalahan terkait urusan perumahan permukiman yang perlu menjadi perhatian diantaranya adalah:

- Perlunya peningkatan ketersediaan prasarana penunjang permukiman sehat seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air limbah dan air hujan, ketersediaan air bersih, dan ketersediaan ruang publik
- Masih terdapat beberapa wilayah/kawasan yang masuk dalam kategori kumuh
- 3. Masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH).

Isu Strategis Bidang Penelitian Teknonolgi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan

- 1. Perlunya perangkat keras dan sistem informasi manajemen untuk mendukung penyediaan data dan informasi secara komprehensif dan *up to date*
- 2. Peningkatan kualitas hasil pekerjaan konstruksi
- Perlunya pengadaan alat-alat berat yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab II Perencanaan Kinerja berisi :

- a. Rencana Strategis
- b. Perjanjian Kinerja
- c. Program Untuk Pencapaian Sasaran

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yang dicanangkan, adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

- 1. Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- 3. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

6. Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

- 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas saranaprasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-4: "Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana".

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Tabel 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran/ IKU | | | | | | |
| 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan | Mewujudkan sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%) Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%) | | | | | | |
| kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana | | Meningkatnya kecukupan air irigasi | Persentase kecukupan air irigasi (%) | | | | | | |
| | | Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat | Persentase kawasan kumuh (%) perkotaan yang tertangani | | | | | | |
| | Menciptakan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana | Meningkatnya penanganan banjir | Persentase penanganan banjir (%) | | | | | | |

Sedangkan target indikator kinerja utama tahun 2019 dengan akhir tahun Renstra sebagai berikut.

Tabel 4. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dan Akhir Renstra

| No | Sasaran | Indikator Sasaran/ IKU | Satuan | Target Tahun 2019 | Target Akhir 2021 |
|----|--|--|--------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya sarana dan prasarana publik | ' | | 75,08 | 76,08 |
| | | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | % | 82 | 84 |
| 2. | Meningkatnya kecukupan air irigasi | Persentase kecukupan air irigasi | % | 82,16 | 83,16 |
| 3. | Meningkatnya penanganan banjir | Persentase penanganan banjir | % | 34,12 | 47,68 |
| 4. | Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat | Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani | % | 90 | 100 |

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkahlangkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 5. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

| Tujuan | Tujuan Sasaran | | Kebijakan | |
|--|--|--|--|--|
| | kapasitas dan kualitas sarar memperhatikan kelestaria | | | |
| Mewujudkan layanan infrastruktur publik yang berkualitas dan | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik | Penyelenggaraan peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten | Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan | |
| memadai | | Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah | Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah | |
| | Meningkatnya kecukupan air irigasi | Melaksanakan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi, dan pembangunan bangunan pelengkap | Peningkatan pelayanan kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irgasi dan optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan | |
| | Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat | Peningkatan ketersediaan prasarana penunjang permukiman sehat | Penyelenggaraan layanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman | |
| Menciptakan kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana | Meningkatnya penanganan banjir | Melakukan pengurangan resiko bencana melalui pemeliharaan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan sarana prasarana pengendali bencana | Perlindungan kawasan permukiman, pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sektor strategis lainnya dari ancaman banjir | |

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 Aparatur
- 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 4. Program Pengembangan Perumahan
- 5. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 6. Program pengelolaan areal pemakaman
- 7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

- 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- 9. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- 10. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- 11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- 12. Program Pengendalian Banjir
- 13. Program Pembangunan Gedung
- 14. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 15. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
- 16. Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan
- 17. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Meningkatnya kualitas sarana dan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi | | | | |
| | prasarana publik | mantap | | | | |
| | | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi | | | | |
| | | baik | | | | |
| 2 | Meningkatnya kecukupan air irigasi | Persentase kecukupan air irigasi | | | | |
| 3 | Meningkatnya penanganan banjir | Persentase penanganan banjir | | | | |
| 4 | Meningkatnya pelayanan dasar pada | Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang | | | | |
| | masyarakat | tertangani | | | | |

Sumber: DPUPKP 2019

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2019, IKU dan APBD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 7. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bobot Ariffi 'Aidin, ST, MT

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Suharsono Jabatan : Bupati Bantul

Suharsono

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 18 Januari 2019

Pihak Pertama 1

Bobot Ariffi Aidin, ST, MT

NIP. 19690619 199603 1 003

| 2. | Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong | Rp. | 12,239,152,200 | Anggaran Dekonsentrasi/Tp: . |
|----|---|-----|----------------|--|
| 3. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Rp. | 2,752,875,000 | Dana Keistimewaan : Rp. 6,600,000,000 |
| 4. | Program Pembangunan Gedung | Rp. | 10,681,975,000 | |
| 5. | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Rp. | 1,210,996,000 | |
| 6. | Program Pengembangan Perumahan | Rp. | 1,527,110,000 | |
| 7. | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Rp. | 758,600,000 | |
| 8. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Rp. | 13,136,328,200 | |
| 9. | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | Rp. | 797,800,000 | |
| 10 | Program Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan | Rp. | 29,312,571,200 | |
| 11 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Rp. | 20,457,296,950 | |
| 12 | Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau | Rp. | 1,358,825,000 | |

Organisasi Perangkat Daerah

: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Tahun Anggaran

: 2019

| No Strategis | | Indikator Kinerja Satuan | | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|--------------|---|--|--------|-------------------|--------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Meningkatnya | ngkatnya Persentase jalan | | 75,08 | Triwulan I | - |
| | sarana dan | rana dan kabupaten dalam | | | Triwulan II | |
| | prasarana | kondisi mantap | | | Triwulan III | - |
| | publik | | | | Triwulan IV | 75,08 |
| | | Persentase Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | Persen | 82 | Triwulan I | - |
| | | | | | Triwulan II | - |
| | | | | 1 | Triwulan III | |
| | | | | | Triwulan IV | 82 |
| 2 | Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat | ayanan Kawasan kumuh sar pada perkotaan yang | Persen | 90 | Triwulan I | - |
| | | | | | Triwulan II | |
| | | | | | Triwulan III | |
| | | | | | Triwulan IV | 90 |
| 3 | Meningkatnya | Persentase | Persen | 82,16 | Triwulan I | - |
| | kecukupan air | kecukupan air | | | Triwulan II | - |
| | irigasi | irigasi | | | Triwulan III | 2.5 |
| | | | | | Triwulan IV | 82,16 |
| 4 | Meningkatnya | Persentase | Persen | 34,12 | Triwulan I | - |
| | penanganan | nan penanganan banjir | | | Triwulan II | - |
| | banjir | | | | Triwulan III | - |
| | | | | | Triwulan IV | 34,12 |

Program

Anggaran

Keterangan

1. Program Pembangunan

Rp.

75,594,278,400 Anggaran APBD :

dan Rehabilitasi/

Rp. 187,229,556,767

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

dan Sumber Daya Air Lainnya 13. Program Penyediaan dan Rp. 133,750,000 Pengelolaan Air Baku 14. Program Pengendalian Rp. 8,937,509,800 Banjir 15. Program Pelayanan Rp. 4,694,839,017 Administrasi Perkantoran 16. Program Peningkatan 3,619,000,000 Rp. Sarana dan Prasarana Aparatur 17. Program Peningkatan Rp. 16,650,000 Pengembangan Sistem

Jumlah Rp.

Pelaporan Capaian Kinerja

P Pihak Kedua,

Suharsono

dan Keuangan

DPUP

187,229,556,767

▶ Pihak Pertama, ♣

Bantul, 18 Januari 2019

C. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 8. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Didukung Program |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | | Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengembangan Jasa Konstruksi Program Pembangunan Gedung |
| 2. | irigasi | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/gorong-gorong |
| 3. | Meningkatnya penanganan banjir | |
| 4. | ' | Program pengembangan perumahan Program pengelolaan areal pemakaman Program lingkungan sehat perumahan |

Sumber: DPUPKP, 2019

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi :

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama
- b. Evaluasi danAnalisis CapaianKinerja
- **C.** Akuntabilitas Anggaran
- d. Efisiensi Sumberdaya

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari bukan hanya pembangunan sekedar melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan. sudah Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk

mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan prinsip juga sejalan dengan ini good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung hasilnya oleh dirasakan masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang yang dipergunakan dalam penilaian kriteria kinerja

organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 9. Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|-------------------------------------|---|------|
| 1 | ≥ 90,1 | Sangat Tinggi | |
| 2 | 75,1 ≤ 90 | Tinggi | |
| 3 | 65,1 ≤ 75 | Sedang | |
| 4 | 50,1 ≤ 65 | Rendah | |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul telah

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| | | | | 2018 | | Target | Capaian |
|----|--|-----------------|--------|-----------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2018 | Target | Realisasi | % Realisasi | Akhir Renstra (2021) | s/d 2018 terhada p 2021 (%) |
| 1 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%) | 74,58 | 75,08 | 75,10 | 100,70 | 76,08 | 98,71 |
| 2 | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%) | 84 | 82 | 84 | 102,44 | 84 | 100 |
| 3 | Persentase kecukupan air irigasi (%) | 80,44 | 82,16 | 82,19 | 100,04 | 83,16 | 98,83 |
| 4 | Persentase penanganan banjir (%) | 28,84 | 34,12 | 34 | 99,65 | 47,68 | 71,30 |
| 5 | Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani (%) | 92,06 | 90 | 92,49 | 102,77 | 100 | 92,49 |

Sumber: DPUPKP, 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019,

disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 100,98%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik

Terdapat dua indikator kinerja utama untuk mendukung keberhasilan sasaran ini yaitu persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dan persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik seperti pada tabel di bawah.

Tabel 11. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Publik

| | | Indikator Kinerja Utama | | | 2019 | | Target Akhir | Capaian s/d |
|----|----|---|-----------------|--------|-----------|-------------|--------------|------------------------------|
| No | 10 | | Capaian 2018 | Target | Realisasi | % Realisasi | Ponetra | 2019 terhadap 2021 (%) |
| | 1 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 74,58 | 75,08 | 75,10 | 100,70 | 76,08 | 98,71 |
| á | 2 | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | 84 | 82 | 84 | 102,44 | 84 | 100 |

Sumber: DPUPKP, 2019

Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 75,08%, realisasi sebesar 75,10%, tercapai 100,70% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 74,58% maka capaian tahun 2019 naik sebesar 0,52%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 76,08%. Capaian tahun 2019 ini telah

menyumbangkan 98,71% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Data kondisi jalan kabupaten beraspal pada tahun 2019 sepanjang 465,73km atau 74,58% berada dalam kondisi mantap, sedangkan 158,74km atau 25,42% dalam kondisi belum mantap dari panjang total panjang jalan kabupaten sepanjang 624,47km. Sedangkan kondisi jalan perdesaaan sebagai salah satu sarana dan prasarana dasar belum sepenuhnya dalam kondisi mantap. Pada tahun 2019 terealisasi 25,43km jalan desa di Kabupaten Bantul.

Tabel 12. Kondisi jalan Kabupaten Bantul per Desember 2019

| No | Jenis Panjang | | Kondisi M | lantap | Kondisi Belum Mantap | |
|-----|---------------|--------|-----------------|--------|-------------------------|-------|
| INO | Permukaan | (Km) | Panjang (km) | % | Panjang (km) | % |
| 1 | Aspal | 624,47 | 468,97 | 75,10 | 156,64 | 25,08 |

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

Program Pembangunan dan Rehabilitasi/
 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan agar fungsi jalan menjadi optimal. Indikator kinerja program ini adalah penanganan jalan kabupaten dengan indikator program panjang jalan kabupaten tertangani. Target tahun 2019 sepanjang 17 km, tertangani 41,015km atau 241,26%. Program ini didukung kegiatan:

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan,
 dengan keluaran berupa pemeliharaan rutin
 jalan kabupaten sebanyak 59 ruas
- b. Peningkatan jalan kabupaten sebanyak 66 ruas

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Indikator kinerja program ini adalah tertanganinya drainase jalan kabupaten, dengan formulasi panjang drainase terangani dengan target 500m. Capaian pada tahun 2019 berhasil tertangani 924m atau 184,8%.

Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik

Secara umum kondisi infrastruktur gedung pemerintah di Kabupaten Bantul dalam kondisi baik. Namun demikian perlu adanya peningkatan infrastruktur gedung pemerintah terutama rehabilitasi beberapa gedung yang kondisinya masih kurang memadai. Gedung yang dimaksud adalah gedung kantor seluruh OPD di Kabupaten Bantul, tidak termasuk gedung sekolah maupun puskesmas.

Capaian kinerja yang dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 82%, realisasi sebesar 84%, tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Capaian ini sama dengan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 84%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 84%. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021. Kondisi ini tercapai berkat kinerja dari Program Pembangunan Gedung. Dari 50 (lima puluh) gedung kantor Kabupaten Bantul sebagai sasaran indikator OPD di

terdapat 8 (delapan) gedung dengan kondisi sedang dan 42 (empat puluh dua) atau 84% gedung kantor dengan kondisi baik. Program ini didukung dengan kegiatan Pembangunan Gedung dengan keluaran:

- a. Rehab. Kantor Kecamatan Bantul
- b. Rehab. Kantor Kecamatan Srandakan
- c. Rehab. Kantor Kecamatan Imogiri
- d. Rehab. Kantor Kecamatan Sewon
- e. Rehab. Atap Gudang BKAD
- f. Rehab Garasi dan Lansekap Rumah Dinas Bupati
- g. Lansekap Kecamatan Pajangan
- h. Pembangunan Gedung DPUPKP
- i. Jembatan Penyebrangan Kompleks Parasamya
- j. Penataan Lapangan Paseban
- k. Penyempurnaan Panggung Terbuka Pasar Bantul
- I. Tiang Bendera Lapangan Trirenggo

- m. Landscape dan Penyempurnaan Pendopo Parasamya 2
- n. Penyempurnaan Gapura Batas Kota
- o. Rehab Masjid Agung Manunggal
- p. Pembangunan Pagar Rusunawa P3
- q. Pembangunan Gudang PTS 1
- r. Rehab Mushola Pasar Seni Gabusan
- s. Pembangunan Ground Tank DPUPKP

Dengan terjaganya kondisi gedung-gedung perkantoraan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik.

2. Sasaran 2: Meningkatnya kecukupan air irigasi

Ketersediaan air irigasi menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung ketahanan pangan. Mengingat bahwa posisi geografis Kabupaten Bantul yang berada pada daerah hilir

mempunyai konsekuensi ketika musim kemarau sulit air, ketika musim penghujan kelebihan air. Menyikapi kondisi ini maka pemeliharaan, peningkatan, dan pelestarian fungsi irigasi sangat penting. Dengan kondisi saluran yang baik maka air dapat dihantarkan sampai tujuan, baik ketika saluran berfungsi sebagai pembuangan waktu banjir maupun ketika berfungsi sebagai saluran pembawa yang menghantarkan air irigasi untuk tanaman. Indikator kinerja sasaran ini adalah:

Persentase kecukupan air irigasi

Kinerja dari indikator ini untuk mengukur luas daerah irigasi yang dapat terairi dengan baik dibagi jumlah luas daerah irigasi x 100%. Capaian tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 13. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kecukupan Air Irigasi

| | | Indikator Kinerja Utama | | | 2019 | Target | Capaian | |
|----|----|---|---------|--------|-----------|-----------|---------|----------|
| No | No | | Capaian | | | % | Akhir | s/d 2019 |
| | NO | | 2018 | Target | Realisasi | Realisasi | Renstra | terhadap |
| | | | | | | Nealisasi | (2021) | 2021 (%) |
| | 1 | Persentase kecukupan air irigasi (%) | 80,44 | 82,16 | 82,19 | 100,04 | 83,16 | 98,83 |

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 82,16%, realisasi sebesar 82,19%, tercapai 100,04% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 80,44% maka capaian tahun 2019 naik sebesar 1,75%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 83,16%. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 98,83% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Target kondisi luas sawah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik sebesar 82,16%

(7.050,52Ha) dan terealisasi sebesar 82,19% (7.096,28Ha) atau tercapai sebesar 100,04%. Data target dan capaian Dl kewenangan Kabupaten Bantul yang terlayani air irigasi selama empat tahun terakhir dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 14. Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2016-2018

| Tahun | Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik | | | | |
|-------|---|-------|----------------|-------|--|
| | Target (Ha) | % | Realisasi (Ha) | % | |
| 2016 | 6.820,86 | 79,00 | 7.004,00 | 81,12 | |
| 2017 | 6.907,20 | 80,00 | 7.007,35 | 81,16 | |
| 2018 | 7.050,52 | 81,16 | 6.945,19 | 80,44 | |
| 2019 | 7.093,69 | 82,16 | 7.096,28 | 82,19 | |

Sumber: DPUPKP, 2019

Capaian ini merupakan kinerja dari program:

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
 Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Capaian indikator kinerja program ini adalah kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2019 (DI kewenangan Kabupaten Bantul) adalah 82% (192.773m) dan terealisasi 82,15% (193.125,6m) atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,15%. Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama empat tahun terakhir dari tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 15. Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2018

| | Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------|---------------|-------|--|
| Tahun | dalam kondisi baik) | | | | |
| | Target (m) | % | Realisasi (m) | % | |
| 2016 | 190.422,09 | 81,00 | 193.957,00 | 82,50 | |
| 2017 | 188.071,20 | 80,00 | 188.541,38 | 80,20 | |
| 2018 | 189.247,65 | 80,50 | 190.422,09 | 81,00 | |
| 2019 | 192.773,00 | 82,00 | 193.125,60 | 82,15 | |

Sumber: DPUPKP, 2019

Program ini didukung oleh kegiatan:

- a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya meliputi:
 - Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi
 UPT Bedog Winongo Kecil
 - Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi
 UPT Winongo
 - Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi
 UPT Opak Oyo
 - 4) Inventarisasi Kerusakan dan Penyusunan DED Rehabilitasi DI Karangploso Kanan
- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi,
 rawa dan jaringan pengairan lainnya
 Hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan/rehabilitasi Jaringan
 Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) :
 - Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) sebanyak 6 DI (DI. Mojo, DI. Sono, DI. Sumberan, DI. Guntur, dan DI. Kadisono Kanan).
 - Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan
 Irigasi pada 35 Daerah Irigasi
 - Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi pada 6 Daerah Irigasi melalui sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) (DI. Kadisono, DI. Canden, DI. Jotawang, DI. Mejing, DI. Kepuh Kulon, DI. Karangploso Kiri)
- 2) Rehabilitasi dan Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi Bangunan Ukur dan Pielschale

- 3) Rehabilitasi Gorong-Gorong
- 4) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air
- c. Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk pemeliharaan jaringan irigasi pada 3 UPT yaitu UPT Winongo, UPT Opak Oyo dan UPT BWK.
- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
 Program ini bertujuan untuk mendukung penyediaan dan pengelolaan air baku dengan anggaran Rp.132.065.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah pemeliharaan 1 unit sumur bor.
- 3. Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
 - a. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber air dan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya dengan output kegiatan berupa pembangunan Embung Kaliurang dan Embung Pokoh II di Kecamatan Dlingo, Embung Mrican di Kecamatan Pandak, Embung Tuk Demen di Kecamatan Pajangan dan Embung Tuk Siloning di Kecamatan Kretek.
 - 2) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air dengan output kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan rambu larangan sebanyak 27 unit.

3. Sasaran 3: Meningkatnya penanganan banjir Persentase penanganan banjir

Topografi Kabupaten Bantul dengan bentukan alamnya secara alami menciptakan kawasan potensi banjir genangan maupun banjir luapan. Adanya aktifitas manusia yang mengubah alam mempunyai efek samping antara lain menghambat fungsi drainase sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Untuk mengetahui capaian untuk sasaran ini melalui indikator yaitu seberapa besar pengurangan luas potensi banjir. Apabila potensi luasan banjir makin berkurang maka mengindikasikan tercapainya sasaran ini. Capaian penanganan banjir tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 16. Capaian Persentase Penanganan Banjir Tahun 2019

| | | | | | 2019 | | Target | Capaian |
|---|-----|-------------------|---------|--------|-----------|-----------|---------|----------|
| | No | Indikator Kinerja | Capaian | | | % | Akhir | s/d 2019 |
| | 110 | Utama | 2018 | Target | Realisasi | | Renstra | terhadap |
| | | | | | | Realisasi | (2021) | 2021 (%) |
| ĺ | 1 | Persentase | 28,84 | 34,12 | 34 | 99,65 | 47,68 | 71,30 |
| | | penanganan banjir | | | | | | |

Capaian indikator kinerja persentase penanganan banjir adalah 34% (257,70Ha) dari target 34,12% (303,81Ha) atau tercapai 99,65% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 28,84% maka capaian tahun 2019 naik 5,16%. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 47,68% maka capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 71,30% dari target akhir Renstra tahun 2021. Realisasi capaian indikator penanganan banjir tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 17. Target, Realisasi, dan Kinerja untuk Indikator Penanganan Banjir (%) Tahun 2015-2019

| | | Т | arget | Re | | |
|----|-------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------------|
| No | Tahun | % | Penanganan Banjir (ha) | % | Penanganan Banjir (ha) | Kinerja (%) |
| 1 | 2015 | 13,52 | 120,80 | 13,52 | 120,80 | 100 |
| 2 | 2016 | 13,78 | 123,13 | 20,30 | 181,43 | 147,71 |
| 3 | 2017 | 20,56 | 183,71 | 24,90 | 222,49 | 121,11 |
| 4 | 2018 | 27,34 | 244,30 | 28,84 | 257,70 | 105,49 |
| 5 | 2019 | 34,12 | 304,88 | 34,00 | 303,81 | 99,65 |

Ket.: Luas daerah rawan banjir luapan tahun 2014 adalah 893,56 Ha

Capaian kinerja di atas, merupakan hasil dari program:

1. Program Pengendalian Banjir

Program pengendalian banjir mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan lokasi penanganan banjir baik dari sungai maupun afvour akibat curah hujan yang tinggi. Dari 18 lokasi

yang menjadi target kinerja tahun 2019 terealisasi 17 lokasi penanganan banjir atau 94,44% dari target. Program ini didukung dengan kegiatan:

- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai dengan keluaran:
 - Perkuatan tebing sungai sebanyak 9
 paket yaitu Sungai Bulus, Sungai Belik,
 Sungai Celeng Girirejo, Sungai Mruwe,
 Sungai Kuning, Sungai Pesing dan
 Sungai Kenet Selopamioro.
 - Peningkatan afvour sebanyak 54 paket pekerjaan.
- 4. Sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat

Persentase kawasan kumuh Perkotaan yang Tertangani

Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Data kawasan kumuh perkotaan tertangani pada tahun 2019 adalah 92,49% dari target akhir RPJMD yaitu 100%, atau sekitar 73,29 Ha dari keseluruhan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bantul yaitu 79,61 Ha pada tahun 2018 (berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati No. 220 tahun 2016).

Tabel 18. Capaian Persentase Kawasan Kumuh Tertangani Tahun 2019

| | | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2018 | 2019 | | | Target | Capaian |
|---|----|-------------------------|-----------------|--------|-----------|----------------|---------|----------|
| | No | | | Target | Realisasi | % | Akhir | s/d 2019 |
| ı | '' | | | | | % Realisasi | Renstra | terhadap |
| ı | | | | | | Realisasi | (2021) | 2021 (%) |
| | 1 | Persentase Kawasan | 92,06 | 90 | 92,49 | 102,77 | 100 | 92,49 |
| | | kumuh perkotaan yang | | | | | | |
| | | tertangani | | | | | | |

Capaian indikator kinerja persentase Persentase Kawasan kumuh perkotaan yang tertangani adalah 92,49% dari target 90% atau tercapai 102,77% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 92,06% maka capaian tahun 2019 naik 0,43%. Target capaian tahun 2021 (akhir renstra) sebesar 100% maka capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 92,49% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian indikator ini terlaksana melalui program:

1. Program Pengembangan Perumahan
Indikator kinerja program ini adalah Persentase
penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH). Dari
49% target yang ditetapkan pada tahun 2019
tercapai 80,74% atau 164,78% dari target atau 4.605
unit dari jumlah RTLH 5.703 unit. Kegiatan
pendukung dan keluaran pada program ini adalah:

- a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan dengan keluaran berupa Dokumen Kajian Penyerahan Fasum dan Fasos, Dokumen Kajian Penyelenggaraan Perumahan, Dokumen Pemetaan RTLH dan Sistem Informasi Jalan Desa
- b. Penyelenggaraan pengembangan perumahan dengan keluaran berupa SIM Perumahan
- c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan output berupa penyaluran dan pendampingan penanganan RTLH sumber dana DAK sebanyak 171 unit dan sumber dana APBD Kabupaten Bantul sebanyak 83 unit.
- d. Operasional empat unit rusunawa, yaitu
 Rusunawa Panggungharjo, Rusunawa
 Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan
 Rusunawa Tamanan;

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh dengan output berupa penataan Kawasan kumuh di Dusun Salakan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon dan Dusun Jaranan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan.

3. Pengelolaan Areal Pemakaman

Pesatnya pembangunan perumahan tidak sebanding dengan ketersediaan pemakaman umum. Hal ini memicu terjadinya permasalahan konflik sosial antara warga perumahan dengan masyrakat sekitar. Program ini dilaksanakan melalui pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang bertujuan untuk menyediakan areal pemakaman umum di Kecamatan Imogiri. Penyediaan pemakaman umum

merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan pemakaman khususnya bagi masyarakat yang tinggal di perumahan.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program ini bertujuan untuk menyediakan memperluas cakupan pelayanan air bersih, limbah, dan drainase sehingga dapat menanggulangi lingkungan kerawanan air, pencemaran dan genangan air hujan. Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan pengembangan IPAL Komunal. Dan sampai dengan tahun 2019 telah terbangun IPAL Komunal dari APBD sebanyak 41 unit atau 91,11% dari target sebanyak 45 unit. Program ini didukung dengan kegiatan:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah meliputi:
 - 1) Pembangunan SR IPAL Terpusat di 3 kecamatan yaitu Banguntapan, Sewon dan Kasihan.
 - Pembangunan saluran drainase/air hujan di 26 lokasi tersebar di Kabupaten Bantul.
- b. Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah dengan keluaran berupa dokumen kajian/ studi air minum dan air limbah.
- c. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dengan keluaran meliputi:

- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM):
 - a) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Jatimulyo Dlingo (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/ SRM-Unit Pelayanan;
 - b) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Timbulharjo Sewon (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/ SRM-Unit Pelayanan;
 - c) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Gllangharjo Pandak (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/ SRM-Unit Pelayanan;

- d) SPAM Desa pada 3 tiga desa yiatu SPAM Desa Selopamioro,
 Desa Triharjo Pandak dan Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret.
- 2) Dua SRM di Jetis dan Kasihan
- 3) Pengadaan SR Air Minum di Wijirejo Kecamatan Pandak.
- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 5. Indikator kinerja program ini adalah persentase infrastruktur perdesaan penanganan dengan indicator Persentase program penanganan infrastruktur perdesaan yang diukur dengan formulasi panjang jalan desa yang ditangani dibagi total panjang jalan desa dikalikan seratus persen. Capaian tahun 2019 ini 25,43 km dari panjang jalan desa 149,82km (16,97%) atau 107,06% dari target 15,85%.

Program ini didukung dengan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyediakan sarana prasarana aksesibilitas wilayah dan fasilitas perdagangan di wilayah perdesaan dengan keluaran yaitu pembangunan jalan dan jembatan perdesaan berupa pembangunan jalan desa sebanyak 89 ruas sepanjang 25,43 km.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan serta solusi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam upaya pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

| NO | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|--|---|
| 1 | Semakin besarnya potensi kerusakan jalan kabupaten, akibat banyaknya kendaraan tonase besar yang melewati jalan kabupaten | Peningkatan struktur jalan pada jalur yang dilalui angkutan penambangan galian C. |
| 2 | Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah (seperti : material dan tenaga kerja) dalam pemenuhan | Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah |

| | infrastruktur dasar | |
|----|--|--|
| 3 | Belum optimalnya pencapaian target master plan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, dan jaringan irigasi untuk pengurangan ketimpangan wilayah. | Optimalisasi pencapaian target master plan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, dan jaringan irigasi |
| 4 | Masih rendahnya kualitas jasa konstruksi khususnya di bidang pengembangan permukiman | Perlunya pembinaan dan peningkatan sumber daya pelaku jasa konstruksi |
| 5 | Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan jalan dan irigasi untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi overlapping pembangunan dan pemeliharaannya | Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan jalan dan irigasi |
| 6 | Terbatasnya pilihan alternatif pendanaan infrastruktur | Koordinasi dengan instansi/ pemerintah pusat/swasta untuk mendapatkan anggaran pembangunan infrastruktur. |
| 7 | Belum optimalnya pengelolaan cadangan air irigasi | Pengembangan dan pengelolaan air baku |
| 8 | Masih rendahnya cakupan pelayanan PDAM | Pengembangan sarara prasarana jaringan perpipaan PDAM |
| 9 | Rendahnya pelibatan peran serta masyarakat dalam penyediaan air bersih komunitas dan pengelolaan sanitasi masyarakat | Peningkatan kapasitas SDM masyarakat dalam pengelolaan ari bersih dan sanitasi berbasis masyarakat |
| 10 | Belum optimal koordinasi bidang air bersih | Peningkatan koordinasi bidang air bersih |
| 11 | Belum optimalnya kinerja pengembangan sanitasi komunal | Peningkatan kinerja pengembangan sanitasi komunal |
| 12 | Belum optimalnya pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu | Optimalisasi dan pengembangan pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu |
| 13 | Belum optimalnya pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu | Optimalisasi pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu |

| 14 | , , , , , | Pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana. |
|----|-----------|--|
| 15 | | Optimalisasi dan koordinasi sinergi kebijakan rumah layak huni. |

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya:

- Menjaring aspirasi masyarakat akan infrastruktur yang dibutuhkan.
- 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada secara berkala dan berkesinambungan.
- 3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur secara bertahap sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan.
- 4. Koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat/swasta untuk mendapatkan dana peningkatan infrastruktur.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebesar Rp.200.916.056.767,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.181.130.689.315,00 atau sebesar 90,15%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

2019 LKI DPUPKP

Tabel 19. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp) | % |
|----|---|-----------------|-------|
| 1 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik | 105.427.278.178 | 52,47 |
| 2 | Meningkatnya kecukupan air irigasi | 21.132.371.950 | 10,52 |
| 3 | Meningkatnya penanganan banjir | 15.522.509.800 | 7,73 |
| 4 | Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat | 50.284.102.822 | 25,03 |
| | Jumlah | 192.366.262.750 | 95,74 |
| | Belanja Langsung Pendukung | 8.549.794.017 | 4.26 |
| | Total Belanja Langsung | 200.916.056.767 | 100 |

Sumber: DPUPKP, 2019

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.192.366.262.750,00 atau sebesar 95,74% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp8.549.794.017,00 atau sebesar 4,26% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik dengan besaran anggaran 52,47% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya penanganan banjir sebesar 7,73% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 90,15% dari total anggaran belanja langsung dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan Realisasi anggaran daerah. anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 90,05%, sedangkan untuk program/kegiatan pendukung sebesar realisasi 92,53%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU

Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik sebesar 94,74%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 88,24%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kecukupan air irigasi menyerap anggaran paling besar yaitu 92,67% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik menyerap anggaran terkecil yaitu 88,99% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 20. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

| No | Indikator Kinerja | | Kinerja | | Anggaran | | | |
|-----|---|--------|-----------|--------|----------------|----------------|-------|--|
| 110 | markator Kinerja | Target | Realisasi | % | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % | |
| 1 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 75,08 | 75,10 | 100,70 | 93.338.707.178 | 82.362.411.750 | 88,24 | |
| 2 | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | 82 | 84 | 102,44 | 12.088.571.000 | 11.452.381.500 | 94,74 | |
| 3 | Persentase kecukupan air irigasi | 82,16 | 82,19 | 100,04 | 21.132.371.950 | 19.582.766.505 | 92,67 | |
| 4 | Persentase penanganan banjir | 34,12 | 34 | 99,65 | 15.522.509.800 | 14.294.826.000 | 92,09 | |
| 5 | Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani | 90 | 92,49 | 102,77 | 50.284.102.822 | 45.526.828.344 | 90,54 | |

Sumber: DPUPKP, 2019

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 9,85%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang

telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar sedangkan efisiensi untuk 9,95%, program/kegiatan pendukung sebesar 7,47%. Jika dilihat dari efisiensi per IKU, efisiensi anggaran terbesar anggaran program/kegiatan di IKU Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 11,76%, sedangkan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase kecukupan air irigasi sebesar 7,33%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 11,01% dari anggaran target. Sedangkan Persentase kecukupan air irigasi, efisiensi sasaran anggarannya terkecil yaitu 7,33% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 21. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

| No | Indikator Kinerja | Anggaran | | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------|----------------|-------|--|--|--|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | % | | | |
| 1 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 93.338.707.178 | 82.362.411.750 | 10.976.295.428 | 11,76 | | | |
| 2 | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | 12.088.571.000 | 11.452.381.500 | 636.189.500 | 5,26 | | | |
| 3 | Persentase kecukupan air irigasi | 21.132.371.950 | 19.582.766.505 | 1.549.605.445 | 7,33 | | | |
| 4 | Persentase penanganan banjir | 15.522.509.800 | 14.294.826.000 | 1.227.683.800 | 7,91 | | | |
| 5 | Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani | 50.284.102.822 | 45.526.828.344 | 4.757.274.478 | 9,46 | | | |
| | Jumlah | 192.366.262.750 | 191.138.578.950 | 19.147.048.651 | 9,95 | | | |
| В | elanja Langsung Pendukung | 8.549.794.017 | 7.911.475.216 | 638.318.801 | 4,26 | | | |
| | Total Belanja langsung | 200.916.056.767 | 181.130.689.315 | 19.785.367.452 | 9,85 | | | |

Sumber: DPUPKP, 2019

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik prinsip-prinsip transparansi, berdasarkan akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan efisien. demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari dan instansi visi, misi strategi pemerintah yang kegagalan mengindikasikan tingkat keberhasilan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawsan Permukiman Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak empat sasaran, lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100,98% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Tahun 2016 Permukiman Kabupaten Bantul 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang memenuhi target yang ditetapkan, kami belum akui

semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.



